

## Lampiran 6.

### Peraturan Presiden Selama Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu

Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (6) UU nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dirumuskan bahwa Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.

Peraturan Presiden yang ditelaah adalah peraturan presiden yang diterbitkan selama periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, dari periode tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan 31 Agustus 2007. Selama periode tersebut telah dikeluarkan 285 peraturan presiden, yang terdiri dari 5 peraturan presiden pada tahun 2004, 83 peraturan presiden pada tahun 2005, 112 peraturan presiden pada tahun 2006, dan 85 peraturan presiden pada tahun 2007. Namun ada 14 peraturan presiden pada tahun 2007 yang belum diperoleh dokumennya sehingga tidak dapat ditelaah, sehingga jumlah peraturan presiden yang ditelaah berjumlah 271 peraturan presiden, dengan rincian pada tabel 1.

Tabel 1. Telaah Pengaturan Peraturan Presiden Terhadap KUKM Yang Diterbitkan Periode 20 Oktober 2004 – 31 Agustus 2007

Tahun	Relevansi				Signifikansi			Daya Guna					Jumlah
	R1	R2	R3	R4	S1	S2	S3	D1	D2	D3	D4	D5	
2004	0	1	0	4	0	1	4	0	0	0	1	4	5
2005	1	24	1	57	8	24	51	0	0	13	21	49	83
2006	0	14	1	97	5	23	84	0	0	11	18	83	112
2007	0	5	0	66	3	12	56	1	0	4	11	55	71
Jumlah	1	44	2	224	16	60	195	1	0	28	51	191	271

Telaah terhadap peraturan presiden didasarkan pada tiga hal, yaitu: (1) relevansi substansi pengaturan peraturan presiden dengan upaya pemberdayaan KUKM, (2) signifikansi dampak substansi pengaturan peraturan presiden terhadap perkembangan kinerja pemberdayaan KUKM pada masa mendatang, dan (3) daya guna substansi pengaturan peraturan presiden dalam mempengaruhi kinerja pemberdayaan KUKM di Indonesia.



Relevansi dikaitkan dengan keterkaitan substansi pengaturan dalam peraturan presiden dengan pemberdayaan KUMKM, yang dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu: (1) peraturan presiden yang mengatur langsung KUMKM; (2) peraturan presiden yang tidak mengatur langsung KUMKM, tapi dinilai berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM pada masa mendatang; (3) peraturan presiden yang tidak mengatur langsung KUMKM, tapi seharusnya dapat diberikan muatan yang berkaitan dengan KUMKM, dan (4) peraturan presiden yang tidak mengatur KUMKM dan seharusnya memang tidak perlu mengatur secara spesifik mengenai KUMKM.

Ada 16 Peraturan Presiden yang memiliki dampak signifikan dan bersifat langsung terhadap upaya pemberdayaan KUMKM, yaitu: Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004 – 2009; Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri; Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005; Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR; Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri; Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006; Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri; Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005; Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2006 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun Anggaran 2007; Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Dalam kaitannya dengan aspek daya guna, ada 1 peraturan presiden yang dinilai mampu memperbaiki struktur pasar KUMKM, yaitu Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Hasil telaah selengkapnyanya terhadap peraturan presiden selama periode 20 Oktober 2004 – 31 Agustus 2007 dapat diikuti pada tabel 2.

Tabel 2 Hasil Telaah Peraturan Presiden Selama Periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2005 – Agustus 2007

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikan	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
2004	Perpres 01/04	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar Menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar	4	3	5	Pendidikan	Jasa Pendidikan
	Perpres 02/04	Pernyataan perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	4	3	5	Hankam	Lintas sektor
	Perpres 03/04	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005	2	2	4	Anggaran Daerah	Lintas sektor
	Perpres 04/04	Pengesahan <i>Protocol To Amend The ASEAN Framework Agreement On Services</i> (Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN)	4	3	5	Hubungan Internasional	Jasa keuangan, persewaan dan pengembangan usaha
	Perpres 05/04	Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon 1	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa pemerintahan
2005	Perpres 01/05	Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 02/05	Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	4	3	5	Pendidikan	Jasa pendidikan
	Perpres 03/05	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintahan Republik Tajikistan	4	3	5	Hubungan internasional	Perdagangan luar negeri
	Perpres 04/05	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Bolivar Venezuela Mengenai Kerjasama Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan	4	3	5	Hubungan Internasional	Jasa Pendidikan
	Perpres 05/05	Pengesahan <i>Protocol of The Authentic Quinquelingual Text of the Convention on Civil Aviation, Chicago 1944</i> (Protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Kelima dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944)	4	3	5	Hubungan Internasional	Transportasi
	Perpres 06/05	Pengesahan <i>Protocol of The Authentic Six-Language Text of the Convention on Civil Aviation, Chicago 1944</i> (Protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Keenam dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944)	4	3	5	Hubungan Internasional	Transportasi

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikan	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
2005	Perpres 07/05	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009	1	1	3	Administrasi pemerintahan	Lintas sektor
	Perpres 08/05	Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 09/05	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 10/05	Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 11/05	Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden No. 103 thn. 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 12/05	Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 13/05	Pembentukan Sekretariat Mahkamah Agung (MA)	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa pemerintahan
	Perpres 14/05	Kepaniteraan MA	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa pemerintahan
	Perpres 15/05	Perubahan atas Peraturan Presiden No. 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon I kementerian negara RI	2	2	4	Kelembagaan pemerintah	Jasa pemerintahan
	Perpres 16/05	Pembentukan Dewan Riset Nasional (DRN)	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 17/05	Pembentukan Komisi Kepolisian Nasional	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa pemerintahan
	Perpres 18/05	Pembentukan komisi Kejaksaan RI	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa pemerintahan
	Perpres 19/05	Standar Nasional Pendidikan	4	3	5	Perumahan Rakyat	Jasa keuangan
	Perpres 20/05	Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Merek	4	3	5	Kekayaan intelektual	Perdagangan luar negeri
	Perpres 21/05	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 22/05	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri	2	1	3	Energi	Perhubungan
Perpres 23/05	SekJend DPR	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa pemerintahan	

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 24/05	Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
2005	Perpres 25/05	Tim Dokter Kepresidenan	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa kesehatan
	Perpres 26/05	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat	4	3	5	Aparatur	Komunikasi
	Perpres 27/05	Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa pemerintahan
	Perpres 28/05	Pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa pemerintahan
	Perpres 29/05	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun anggaran 2005	2	1	3	Keuangan negara	Lintas sektor
	Perpres 30/05	Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	2	2	3	Administrasi pemerintahan	Lintas sektor
	Perpres 31/05	Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa pemerintahan
	Perpres 32/05	Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2	2	4	Administrasi pemerintahan	Lintas sektor
	Perpres 33/05	Pengesahan <i>Beijing Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer</i> (Amendemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)	4	3	5	Lingkungan Hidup	Lintas sektor
	Perpres 34/05	Susunan organisasi dan tata kerja hak keuangan badan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi NAD dan Kepulauan NIAS Prov. SUMUT	4	3	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 35/05	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	4	3	4	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 36/05	Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum	2	2	3	infrastruktur	Konstruksi
	Perpres 37/05	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 38/05	Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	4	2	3	Hankam	Lintas sektor
	Perpres 39/05	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006	2	1	3	Administrasi pemerintahan	Lintas sektor
2005	Perpres 40/05	Staf Khusus Presiden	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 41/05	Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi TNI.	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 42/05	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur	4	2	4	Administrasi pemerintahan	Jasa pemerintahan
	Perpres 43/05	Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat	2	1	3	Keuangan negara	Jasa keuangan
	Perpres 44/05	Pengesahan <i>International Convention On Maritime Liens And Mortgages, 1993</i> (Konvensi Internasional Tentang Piutang Maritim Dan Mortgage, 1993)	4	3	5	Hubungan Internasional	Perikanan
	Perpres 45/05	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2006	4	3	5	Agama	Transportasi
	Perpres 46/05	Pengesahan <i>Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer</i> (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)	4	3	5	Lingkungan Hidup	Lintas sektor
	Perpres 47/05	Pengesahan <i>Amendment To The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal</i> (Amendemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya)	4	3	5	Lingkungan	Lintas sektor
	Perpres 48/05	Tunjangan bahaya radiasi bagi PNS di lingkungan badan pengawas tenaga nuklir	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 49/05	Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 50/05	Lembaga Produktivitas Nasional	4	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
Perpres 51/05	Pembentukan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa pemerintahan	

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 52/05	Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 53/05	Gaji, Tunjangan, Dan Fasilitas Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
2005	Perpres 54/05	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	4	2	4	Administrasi pemerintahan	Lintas sektor
	Perpres 55/05	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri	2	1	3	Energi	Pertambangan
	Perpres 56/05	Pembentukan tim monitoring dan evaluasi program subsidi langsung tunai kepada rumah tangga miskin	4	2	4	Administrasi pemerintahan	Lintas sektor
	Perpres 57/05	Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;	4	3	5	Pendidikan	Jasa Pendidikan
	Perpres 58/05	Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 59/05	Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas	4	3	5	Hubungan Internasional	Jasa pemerintahan
	Perpres 60/05	Pengesahan <i>Framework Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Secretariat of The Basel Convention on The Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal on The Establishment of a Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia</i> (Peretujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel Mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya Tentang Pembentukan Pusat Regional Konvensi Basel Untuk Pelatihan dan Alih Teknologi bagi Asia	4	3	5	Lingkungan Hidup	Jasa Pendidikan

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikan	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
		Tenggara)					
	Perpres 61/05	Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa pemerintahan
	Perpres 62/05	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
2005	Perpres 63/05	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 64/05	Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 65/05	Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;	4	3	5	Kelembagaan pemerintah	Jasa pemerintahan
	Perpres 66/05	Honorarium Bagi Anggota Dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 67/05	Kerjasama Pemerintah dengan badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	4	2	4	infrastruktur	Konstruksi
	Perpres 68/05	Tata Cara Mempersiapkan Rancangan UU, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa pemerintahan
	Perpres 69/05	Peran serta Lembaga/Perorangan Asing dalam Rangka Hibah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	3	2	3	Pemerintahan	Jasa pemerintahan
	Perpres 70/05	Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	2	2	4	Administrasi pemerintahan	Lintas sektor
	Perpres 71/05	Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	2	1	3	Energi	Pertambangan

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 72/05	Pengesahan Agreement on The Network of Aquaculture Centres in Asia and The Pacific as Amended By The Governing Council at Its 14th Meeting, 28 March - 1 April 2003, Yangon, Myanmar	4	3	5	Hubungan Internasional	Perikanan
	Perpres 73/05	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006	2	1	3	Keuangan negara	Jasa Pemerintahan
	Perpres 74/05	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006	2	2	4	Anggaran Daerah	Lintas sektor
2005	Perpres 75/05	Sekretariat Jenderal Komisi Judisial	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa Pemerintahan
	Perpres 76/05	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten	4	3	5	Pendidikan	Jasa Pendidikan
	Perpres 77/05	Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan	2	2	3	Pertanian	Pertanian
	Perpres 78/05	Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar	4	3	5	Administrasi Pemerintahan	Jasa Pemerintahan
	Perpres 79/05	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1979 tentang Pengadaan Besi Baja	4	3	5	Industri	Industri pengolahan
	Perpres 80/05	Perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 81/05	Badan Koordinasi Keamanan Laut	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Perikanan, transportasi
	Perpres 82/05	Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 83/05	Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa Pemerintahan
2006	Perpres 01/06	Penyesuaian gaji pokok PNS menurut PP Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam gaji pokok PNS menurut PP Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 02/06	Penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan



Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
		Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.					
2006	Perpres 03/06	Tunjangan Jabatan Struktural	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 04/06	Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran dengan Peraturan Presiden.	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 05/06	Kebijakan Energi Nasional sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional.	2	2	3	Energi	Pertambangan
	Perpres 06/06	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	4	3	5	Hubungan Internasional	Lintas sektor
	Perpres 07/06	Pembentukan Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza.	4	2	4	Administrasi pemerintahan	Peternakan, kesehatan
	Perpres 08/06	Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	2	2	4	Administrasi pemerintahan	Lintas sektor
	Perpres 09/06	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, dengan Peraturan Presiden.	2	1	3	Energi	Pertambangan
	Perpres 10/06	Badan Pertanahan Nasional	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 11/06	Perubahan Perguruan Tinggi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha dengan Peraturan Presiden;	4	3	5	Pendidikan	Jasa Pendidikan



Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 12/06	Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 13/06	Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 14/06	Tunjangan Umum bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 15/06	Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.	3	3	5	Aparatur	Industri pengolahan
	Perpres 16/06	Pengesahan <i>Protocol To Amend The Basic Agreement on ASEAN Industrial Cooperation Scheme</i> (Protokol perubahan persetujuan dasar skema kerja sama industri ASEAN)	4	3	5	Hubungan Internasional	Perdagangan luar negeri
2006	Perpres 17/06	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik Ecuador , Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik ( <i>Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the Republic of Ecuador on economic and technical cooperation</i> )	4	3	5	Hubungan Internasional	Lintas sektor
	Perpres 18/06	Pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dengan pemerintah Republik Islam Iran tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan atas penghasilan teknik ( <i>Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran for the Avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income</i> )	4	3	5	Keuangan negara	Lintas sektor
	Perpres 19/06	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007	2	1	3	Administrasi Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 20/06	Tunjangan Panitera	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 21/06	Tunjangan Petugas Pemasyarakatan	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 22/06	Tunjangan Jurusita dan Jusurita Pengganti	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 23/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 24/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan



Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikan	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 25/06	Tunjangan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi penelitian	4	3	5	Pertanian	Jasa pemerintahan
	Perpres 26/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Oranisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Benih Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan	4	2	4	Aparatur	Pertanian
	Perpres 27/06	Tunjangan jabatan fungsional penyuluh kehutanan	4	2	4	Aparatur	Kehutanan
	Perpres 28/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	4	3	5	Aparatur	Kehutanan
	Perpres 29/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 30/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan	4	3	5	Aparatur	Konstruksi
2006	Perpres 31/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 32/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 33/06	Tunangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 34/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 35/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek	4	2	4	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 36/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 37/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 38/06	Tunjangan Fungsional Perencana	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 39/06	Tunjangan Jabatan Analis Kepegawaian	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 40/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 41/06	Tunjangan Jabatan Arsiparis dan Pustakawan	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 42/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	4	3	5	Aparatur	Kehutanan
	Perpres 43/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan



Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 44/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 45/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	4	2	4	Aparatur	Jasa kesehatan
	Perpres 46/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara	4	3	5	Aparatur	Jasa Pendidikan
	Perpres 47/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis	4	3	5	Aparatur	Jasa kesehatan
	Perpres 48/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 49/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
2006	Perpres 50/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 51/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur	4	3	3	Aparatur	Jasa Pendidikan
	Perpres 52/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara	4	3	5	Aparatur	Jasa Pendidikan
	Perpres 53/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	4	2	4	Aparatur	Industri, Perdagangan
	Perpres 54/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 55/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 56/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 57/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 58/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan	4	3	5	Aparatur	Jasa Pendidikan
	Perpres 59/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Dosen	4	3	5	Aparatur	Jasa Pendidikan
	Perpres 60/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 61/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 62/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran	4	3	5	Aparatur	Komunikasi

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 63/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan	4	3	5	Aparatur	Transportasi
	Perpres 64/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera	4	2	4	Aparatur	Perdagangan
	Perpres 65/06	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	4	2	3	infrastruktur	Konstruksi
	Perpres 66/06	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 67/06	Lembaga Ketahanan Nasional	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa pemerintahan
	Perpres 68/06	Pengesahan <i>Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's of the Republic Bangladesh for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income</i> Beserta Protokol	4	3	5	Hubungan Internasional	Perdagangan luar negeri
2006	Perpres 69/06	Pengesahan <i>Agreement Between the Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation</i> (Persetujuan antara Pemerintah Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan)	4	2	3	Hubungan Internasional	Perdagangan luar negeri
	Perpres 70/06	Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Bervariasi Sesuai Perbedaan Besarnya Tarif Penerbangan Haji Per Zona	4	3	5	Agama	Transportasi
	Perpres 71/06	Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara.	4	3	5	Energi	Pertambangan
	Perpres 72/06	Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik	4	3	5	Administrasi Pemerintah	Pertambangan
	Perpres 73/06	Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 74/06	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005.	2	1	3	Keuangan negara	Lintas sektor
	Perpres 75/06	Komisi Penanggulangan AIDS	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa kesehatan
	Perpres 76/06	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 77/06	Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta Menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta	4	3	5	Pendidikan	Jasa pendidikan
	Perpres 78/06	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong	4	3	5	Pendidikan	Jasa pendidikan
2006	Perpres 79/06	Perubahan Kelima Atas Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2	2	4	Administrasi Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 80/06	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintah
	Perpres 81/06	Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Perdagangan luar negeri
	Perpres 82/06	Honorarium Anggota Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas, dan Renumerasi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintah
	Perpres 83/06	Dewan Ketahanan Pangan	4	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Pertanian
	Perpres 84/06	Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	4	2	4	Administrasi Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 85/06	Perubahan Keenam Atas Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2	2	4	Administrasi Pemerintah	Lintas sektor

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikan	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 86/06	Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik yang Menggunakan Batubara	4	3	5	Keuangan negara	Pertambangan, listrik
	Perpres 87/06	Pembatalan Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf (N) dan pasal 34 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Qanun Provinsi NAD nomor 2 tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD	4	3	5	Administrasi Pemerintah	Jasa Pemerintahan
	Perpres 88/06	Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Sebagai Petugas Pemasarakatan	4	3	5	Administrasi Pemerintah	Jasa Pemerintahan
	Perpres 89/06	Panitia Urusan Piutang Negara	4	3	5	Administrasi Pemerintah	Jasa Keuangan
	Perpres 90/06	Perubahan Kedua Atas Perpres nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
2006	Perpres 91/06	Perubahan Kelima Atas Perpres nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 92/06	Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan	4	3	5	Aparatur	Industri
	Perpres 93/06	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun anggaran 2007	2	1	3	Administrasi Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 94/06	Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 95/06	Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa Pemerintahan
	Perpres 96/06	Tunjangan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan



Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikan	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 97/06	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Republik Ekuador Mengenai Pembebasan Visa	4	3	5	Hubungan Internasional	Jasa Pemerintahan
	Perpres 98/06	Pengesahan Seventh Additional Protocol to The Constitution of The Universal Postal Union (Protokol Tambahan Ketujuh Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia)	4	3	5	Hubungan Internasional	Pos, pengiriman
	Perpres 99/06	Pengesahan Persetujuan Tentang Kerjasama Ekonomi Antara Pemerintah RI dan Republik Slovakia	4	2	3	Hubungan Internasional	Perdagangan luar negeri
	Perpres 100/06	Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil Korban Konflik dan/atau Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 101/06	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Republik Islam Iran Tentang Bantuan Administrasi Timbal Balik di Bidang Kepabeanan	4	2	4	Hubungan Internasional	Perdagangan luar negeri
	Perpres 102/06	Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Secara Komprehensif antara Pemerintah RI dan Republik Islam Iran	4	2	3	Hubungan Internasional	Perdagangan luar negeri
2006	Perpres 103/06	Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta	4	3	5	Keuangan negara	Konstruksi
	Perpres 104/06	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007	2	1	3	Keuangan negara	Lintas sektor
	Perpres 105/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 106/06	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa	4	3	5	Pendidikan	Jasa Pendidikan
	Perpres 107/06	Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	4	3	5	Aparatur	Transportasi
	Perpres 108/06	Tunjangan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia	4	3	5	Aparatur	Komunikasi
	Perpres 109/06	Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut	4	3	5	Administrasi Pemerintah	Perikanan
	Perpres 110/06	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan



Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 111/06	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon	4	3	5	Pendidikan	Jasa pendidikan
	Perpres 112/06	Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi	4	3	5	Administrasi Pemerintah	Jasa Pemerintahan
2007	Perpres 01/07	Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	4	3	5	Hukum	Jasa pemerintahan
	Perpres 02/07	Pengesahan ASEAN Tourism Agreement (Pengesahan Persetujuan Parawisata ASEAN)	4	2	3	Hubungan Internasional	Jasa pariwisata
	Perpres 03/07	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.	4	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 04/07	Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007.	4	3	4	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 05/07	Penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 ke dalam gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007.	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
2007	Perpres 06/07	Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi.	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 07/07	Perubahan keenam atas peraturan presiden no 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 08/07	Pengesahan <i>Convention On International Interests In Mobile Equipment</i> (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) beserta <i>Protocol to the Convention on International Interests In Mobile Equipmen on Matters Specific to Aircraft Equipment</i> (Protokol Pada Konvensi Tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara).	4	3	5	Hubungan Internasional	Transportasi

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 09/07	Pengesahan <i>Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission</i> (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia) yang disahkan di Roma, Italia, tanggal 25 Nopember 1993.	4	2	4	Hubungan Internasional	Perikanan
	Perpres 10/07	Tata kerja DPA dan Sekretariat DPA	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa pemerintahan
	Perpres 11/07	Pengesahan <i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea</i> (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea).	4	2	3	Hubungan Internasional	Perdagangan luar negeri
	Perpres 12/07	Pengesahan <i>Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea</i> (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea).	4	2	3	Hubungan Internasional	Perdagangan luar negeri
2007	Perpres 13/07	Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa pemerintahan
	Perpres 14/07	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	4	2	4	Administrasi Pemerintahan	Lintas sektor
	Perpres 15/07	Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	4	3	5	Aparatur	Jasa pemerintahan
	Perpres 16/07	Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	4	3	5	Aparatur	Pertambangan

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 17/07	Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia	2	2	4	Kelembagaan Pemerintah	Lintas sektor
	Perpres 18/07	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008	2	1	3	Administrasi Pemerintahan	Lintas sektor
	Perpres 19/07	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa Pemerintahan
	Perpres 20/07	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2007	4	3	5	Agama	Transportasi
	Perpres 21/07	Pengesahan Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and Bosnia and Herzegovina	4	3	5	Hubungan Internasional	Perdagangan Luar Negeri
	Perpres 22/07	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa Pemerintahan
	Perpres 23/07	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	4	3	5	Kelembagaan Pemerintah	Jasa Pemerintahan
	Perpres 24/07	Tunjangan Panitera	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 25/07	Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 26/07	Tunjangan Jabatan Struktural	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
2007	Perpres 27/07	Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 28/07	Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 29/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 30/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 31/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 32/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Benih Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner Pengawas	4	2	4	Aparatur	Pertanian

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
		Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan					
	Perpres 33/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan	4	2	4	Aparatur	Kehutanan
	Perpres 34/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 35/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 36/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan	4	3	5	Aparatur	Konstruksi
	Perpres 37/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 38/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 39/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 40/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 41/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek	4	2	4	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 42/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 43/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 44/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
2007	Perpres 45/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 46/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 47/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 48/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Agen	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 49/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	4	3	5	Aparatur	Kehutanan
	Perpres 50/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 51/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 52/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	4	2	4	Aparatur	Jasa kesehatan
	Perpres 53/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 54/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis, dan Teknisi Elektromedis	4	3	5	Aparatur	Jasa kesehatan
	Perpres 55/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 56/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 57/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 58/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur	4	3	5	Aparatur	Jasa Pendidikan
	Perpres 59/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara	4	3	5	Aparatur	Jasa Pendidikan
	Perpres 60/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	4	3	5	Aparatur	Industri, Perdagangan
	Perpres 61/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 62/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 63/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
2007	Perpres 64/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Keluarga Berencana	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 65/07	Tunjangan Dosen	4	3	5	Aparatur	Jasa Pendidikan
	Perpres 66/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 67/07	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gununggapi	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Bidang	Sektor Ekonomi
	Perpres 72/07	Tunjangan Petugas Pemasarakatan	4	3	5	Aparatur	Jasa Pemerintahan
	Perpres 76/07	Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	2	1	4	Penanaman Modal	Lintas sektor
	Perpres 77/07	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	2	1	1	Penanaman Modal	Lintas sektor
	Perpres 78/07	Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda)	4	3	5	Hubungan Internasional	Pariwisata
	Perpres 83/07	Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota	4	3	5	Narkotika	Jasa Pemerintahan
	Perpres 85/07	Jaringan Data Spasial Nasional	4	3	5	Administrasi Pemerintah	Jasa Pemerintahan

**Keterangan :**

**Relevansi:**

1. Peraturan mengatur langsung KUKM;
2. Peraturan tidak mengatur langsung KUKM, tetapi berpengaruh terhadap perkembangan KUKM di masa mendatang
3. Peraturan tidak mengatur langsung KUKM, tetapi seharusnya diberikan muatan yang berkaitan dengan KUKM
4. Peraturan Tidak mengatur KUKM dan seharusnya memang tidak perlu mengatur KUKM

**Signifikansi:**

1. Peraturan dinilai berpengaruh langsung terhadap pemberdayaan KUKM
2. Peraturan dinilai berpengaruh secara tidak langsung terhadap pemberdayaan KUKM
3. Peraturan dinilai tidak memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan KUKM pada masa mendatang

**Daya Guna:**

1. Peraturan mampu mengubah struktur pasar yang dihadapi KUKM
2. Peraturan mampu mengubah perilaku pelaku pasar yang terkait dengan pasa KUKM
3. Peraturan mampu mengubah kinerja pasar KUKM
4. Peraturan mampu mempengaruhi kinerja KUKM melalui perubahan atau perbaikan birokrasi pemerintahan
5. Peraturan tidak berpengaruh langsung terhadap kinerha KUKM pada masa mendatang